

Tri-Relasi Kompetensi sebagai “*brand image*” Pendidikan Nasional

Winarto Eka Wahyudi
Universitas Islam Lamongan
Email: Ekawahyudi1926@unisla.ac.id

Article History:

Received: 09-08-2018

Revised: 20-08-2018

Accepted: 05-09-2018

Abstract: *Education runs very dynamically. Because they have to adjust to the pulse of changing times so rapidly, at least three urgent challenges must be answered by national education. The problem of advancing information technology, nationalism and socio-cultural spirit is a sexy issue that must not only be discussed but must also be answered thoroughly. In certain aspects, if education only responds to the progress of science and science, it will give birth to mechanical humans who are far from spiritual and cultural values. For this reason, in the millennial era, it is necessary to form a "brand image" of national education by initiating three competencies that must be carried out in an integrated manner with one another: namely digital competence, national competence and cultural competence. Mainstreaming the three components in the millennial era is crucial, because of the challenges ahead, plurality empties through the three segments. Thus, providing understanding and competence of the nation's generation through these three things, in addition to being a capital to face the swift waves of changing times, also in the context of building a genuine national education self-image amid world education contestation.*

Keyword: *tri-relation, competence, national education*

Pendahuluan

Membahas pendidikan sama halnya dengan membincang masa depan sebuah bangsa. Karena menelisik seberapa ideal negara ke depan, bisa diukur dengan bagaimana pemerintahnya mampu mendesain pendidikan dengan baik sekaligus responsif terhadap tantangan zaman. Sehingga tak heran, jika *founding fathers* di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hal itu dikarenakan tugas utama dan pertama bagi bangsa merdeka adalah menjadikan pendidikan sebagai panglimanya.

Namun, asa para pendiri bangsa justru terbantahkan oleh fakta yang ada saat ini. Seorang guru besar Waseda University, Jepang, Toshiko Kinoshita sebagaimana dikutip oleh Ode mengeluarkan statement bernada pesimis, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan perekonomian negara. Hal ini, menurut Kinoshita disebabkan karena pendidikan tidak pernah diposisikan sebagai panglima.¹

¹ Sismono La Ode, dkk, *Di Belantara Pendidikan Bermoral* (Yogyakarta: UNY Press, 2006), 8.

Posisi pendidikan yang saat ini masih dibawah pamor politik, menjadi kian terdegradasi oleh kenyataan bahwa kebijakan pemerintah mengenai pendidikan selama ini masih bersifat coba-coba dan berjangka pendek sesuai dengan kepentingan politik yang berlaku.² Realitas ini semakin terbukti bahwa semenjak Menteri era pertama, Ki Hajar Dewantara hingga saat ini, arah dan strategi pendidikan nasional terus berbeda bahkan saling bertentangan.

Pada posisi lain, pendidikan sebagai instrument untuk menyiapkan SDM yang berkualitas harus berhadapan dengan tantangan yang terus berdatangan. Semakin kerasnya gesekan sosial antar warga negara, terutama berkenaan dengan isu-isu agama dan dasar negara, menjadi bukti konkrit bahwa problem kebangsaan masih belum tuntas terselesaikan. Padahal spirit kebangsaan, rasa persatuan, kesatuan dan kesetiakawanan merupakan modal utama sebuah negara untuk tetap *survive* menghadapi gempuran perubahan zaman sekaligus menjadi tameng bagi krisis identitas, yang eksistensi mulai tergerus oleh arus globalisasi.³

Dalam konteks lain, semakin populisnya *westernisasi* (dan *arabisasi*) di kalangan masyarakat Indonesia seakan menjadi batu penggerus melepuhnya kebudayaan nasional. Padahal kebudayaan dalam pandangan Ki Hajar merupakan indikator keutuhan bangsa, serta menjadi pertanda tingginya derajat kemanusiaan baik lahir maupun batin.⁴ Semakin abainya generasi muda terhadap kebudayaan adi luhung, baik yang termanifestasikan melalui sikap, sifat dan gaya hidup, sepatutnya dianggap sebagai lonceng atas runtuhnya identitas kebudayaan bangsa.

Selanjutnya, sejak semakin mudahnya akses informasi berbasis digital, setiap orang seakan bebas menafsirkan atas segala sesuatu. Isu-isu tentang politik, pendidikan, ekonomi sampai pada aspek yang paling privat sekalipun (baca: agama), tak luput dari intepretasi publik. Realitas ini tentu berimplikasi pada dua aspek yang justru saling bertentangan.

Di satu sisi, informasi yang dengan mudah dilahap peserta didik melalui akses digital, pada faktanya berkonsekuensi melahirkan generasi latah, yang dengan modalitas pengetahuannya di dunia maya merasa telah absah untuk memberikan pendapat dan penafsiran atas segala sesuatu. Dari sinilah *hatespeech* dan *hoax* beranakpinak, yang pada gilirannya turut menyulut ketegangan social, tak terkecuali kalangan pelajar. Pada konteks ini, pendidikan harus mampu menjadi media untuk membentuk masyarakat yang tak hanya mampu mengoperasikan IT, namun juga bersikap kritis dan evaluatif terhadap segala macam informasi yang tersedia. Disinilah digital literasi menemukan relevansinya.

Menyadari tantangan-tantangan di atas, maka menjadi hal yang mendesak untuk membuat *grand design* kompetensi yang berjalan dengan seiring dan terintegrasi. Usaha ini, selain sebagai bentuk penerjemahan solusi atas problematika yang terjadi secara riil,

² HAR. Tilaar, *Kalaidoskop Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), xxi.

³ *Ibid.*, 93.

⁴ Ki Hajar Dewantara, *Bagian Kedua Kebudayaan*. Cet III. (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 2011), 83.

juga bisa menjadi corak pendidikan masa depan untuk membangun *brand image* di tengah kontestasi pendidikan dunia.

Pendidikan dalam konteks millennial, harus menjadi instrument yang tak hanya menyiapkan intelektual dan memproduksi manusia dengan skill yang tinggi. Namun, juga diimbangi dengan spirit kebangsaan dan kebudayaan untuk menemukan ciri khas pendidikan yang unik. Pendidikan Indonesia harus memiliki warnanya sendiri, harus menjadi *trend* yang tidak hanya dibentuk oleh peradaban asing, tapi harus mampu membentuk peradaban sendiri yang *genuine*. Dari latar belakang pemikiran inilah, gagasan menginisiasi tri relasi kompetensi menjadi sebuah keniscayaan. Yaitu, kompetensi kebangsaan, kebudayaan dan digital.

Pendidikan dan Arah Baru Indonesia Emas: Upaya Mengurai Tantangan

Pendidikan ibarat air, ia harus bersifat lentur dan mampu merasuk pada setiap pojok wadah yang ditempatinya. Sebagaimana air, pendidikan harus memiliki daya ekletis terhadap kondisi zaman yang berlaku. Karena pendidikan hidup di tengah zaman yang menjadi wadahnya. Maka seperti apa zaman memainkan aturannya, disitulah pendidikan dituntut untuk menyediakan jawabannya.

Dalam rangka menjawab kompleksitas tantangan ini, maka arah baru pendidikan Indonesia harus berjalan secara holistik, dan secara diametral tidak boleh berjalan dengan parsial-partikular.⁵ Untuk itu, di era digital yang tumbuh karena suburnya globalisasi ini, pendidikan nasional sedapat dan secepat mungkin harus merumuskan kembali orientasi filosofisnya. Dengan orientasi yang baru ini, pendidikan mempunyai mandat tidak hanya mengajarkan beragam persoalan yang bermuara pada *cognitive domain* saja, dengan mengabaikan aspek *moral and social action*, serta rapuhnya *nation spirit*. Karena justru, aspek terakhir ini menjadi krusial dalam pendidikan, karena akan melahirkan *good and responsible citizen* bagi para pelajar Indonesia di masa mendatang.⁶

Dibawah ini, akan diketengahkan tiga hal yang menjadi muara problematika bangsa Indonesia saat ini, dan mungkin juga ke depan. Penguraian permasalahan dalam paper ini, juga didayagunakan untuk menemukan *positive opportunity* sehingga melahirkan kekuatan (*power*) yang dapat didayagunakan untuk mengatasi solusi atas permasalahan yang muncul.

1. Spirit Literasi dan Kutukan Era Digital

Josh James pernah melansir sebuah data yang dikemas melalui Infographic yang bertitel *Data Never Sleeps 2.0* –data ini dengan sangat mudah bisa diakses di internet-, yang mengungkapkan bahwa di dunia maya pada setiap menitnya terdapat pengguna Youtube yang mengupload 72 jam konten video baru, pengguna *facebook* membagikan

⁵ Sismono La Ode, dkk, *Di Belantara Pendidikan Bermoral*, 131.

⁶ *Ibid.*, 170

2.460.000 status, *twitter* membagikan 277.000 *tweet*, pengguna *instagram* mengupload 216.000 foto atau gambar.⁷

Sementara itu, *internetlivestats.com* mencatat hingga pertengahan Juni tahun 2014 jumlah website di dunia sebanyak 2.925.249.355 laman. Jumlah tersebut sudah termasuk website yang tidak aktif namun hanya berupa laman *parked domains*. Sedangkan untuk dunia blog seperti Wordpress dan Tumblr, menurut *webpagefx.com* bahwa ada 42.6 juta posting terbaru setiap bulannya, baik yang menggunakan *self hosted* maupun di *hosted* Wordpress itu sendiri. Kemudian ada 900 posting terbaru setiap detik di blog Tumblr. Kondisi itu belum ditambah dengan platform blog-blog lain misalnya seperti Blogger, Weebly, dan Livejournal. Dapat dibayangkan berapa banyaknya informasi yang tercipta dalam setiap menitnya di dunia maya.

Di sisi lain, temuan atas perilaku pengguna internet, salah satunya terdisplai melalui hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), bahwa mahasiswa merupakan pengguna terbanyak setelah pekerja-wiraswasta dalam menggunakan internet ketimbang sektor lain. APJII pada tahun 2018 melaporkan, dari 132,7 juta pengguna internet di Indonesia, 18,6 juta diantara dinikmati oleh siswa dan mahasiswa.

Jumlah informasi yang membelukar di internet, baik dalam jenis numerik, teks, gambar, audio atau video berdampak pada terciptanya apa yang disebut sebagai *cyber culture*. Karena berjejalnya informasi dan semakin mudahnya manusia berinteraksi tanpa batas-batas moral dan emosional, pada konteks tertentu berkonsekuensi dalam menumpulkan nalar penguannya (*user*), sehingga pada gilirannya cenderung berdampak pada meningginya daya justifikasi.

Maka, menjadi hal yang tidak mustahil saat *netizen* di waktu tertentu menjadi sangat sopan dan menunjukkan solidaritasnya pada kelompok tertentu, namun di waktu lain berubah menjadi sosok manusia yang culas dan tak segan melemparkan kata-kata sadis dan sarkastis hanya karena perbedaan pandangan dengan masyarakat dunia maya yang lain. Disinilah bukti, bahwa manusia tengah diubah pola berfikir sehatnya oleh makhluk bernama internet yang merupakan anak kandung dari teknologi informasi.

2. Spirit Kebangsaan dan Tantangan Gerakan Subversif di Indonesia

Nasionalisme Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ideal. Realitas ini bisa dirasakan dari degradasi kebangsaan masih memperlihatkan bentuknya melalui konflik-konflik antaretnik, antaragama, serta fenomena disintegrasi dalam wujud lainnya. Konflik antaretnik dan antaragama di Indonesia misalnya, yang mulai memuncak kisaran 1997-2000-an barangkali bisa dijadikan sebagai titik acuan, bahwa spirit kebangsaan jangan sampai kedodoran sehingga konflik turunan memperlihatkan wujudnya melalui gerakan subversif. Sebagaimana yang saat ini masih berdenyut di kawasan Papua.

Realitas kebangsaan ini, pernah disinggung oleh Sindhunata (2000: 93) melalui pertanyaannya yang sarat ironi.

⁷ Data-data ini secara infografis bisa dengan mudah dicari di internet dengan kata kunci "data never sleep".

“... kelumpuhan terasa dalam ketidakberdayaan kita menghadapi fenomena perpecahan dan disintegrasi bangsa. Kita khawatir, bila Aceh jadi merdeka, jangan-jangan kita juga tidak mampu mencegah Ambon, Riau, Papua, Poso, bila mereka ikut-ikutan ingin merdeka. Di manakah kiranya akar dari kerapuhan dan kelumpuhan itu?”⁸

Berangkat dari pertanyaan retorik Sindhunata di atas, penulis mensinyalir, bahwa stagnasi kajian sekaligus internalisasi nilai-nilai keindonesia-an dewasa ini disebabkan kesenjangan yang bersifat struktural dalam masyarakat sendiri. Misalnya, tergerusnya spirit kebangsaan tak hanya disebabkan oleh masifnya nilai-nilai budaya Barat (dan Timur: Arab, Jepang, Korea) dalam pola pikir dan tingkah laku, tetapi juga sekaligus diperparah oleh ketidaksiapan dan ketidakmatangan budaya domestik, untuk merangkul dan memberi inspirasi terhadap apa yang disebut kemodernan.

Lalu, gerakan subversif akan menemukan momentumnya saat bangsa Indonesia sendiri seakan asing terhadap jati dirinya sebagai negara yang besar. Spirit keindonesiaan dengan sangat mudah tumbang, dan akhirnya menyalakan api disintegrasi bangsa dengan sangat mudah. Di negara ini sendiri, eksistensi subversif secara garis besar terkategori dalam dua bentuk. Yaitu yang berbasis etnosentrisme dan kesenjangan keadilan. Jenis pertama ini, nampak pada eksistensi semisal Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selain itu, ada juga yang berbasis ideologi-pemikiran keagamaan yang berpotensi mengubah dasar negara dengan formalisasi agama tertentu.

3. Globalisasi : Ancaman Kebudayaan Nasional

Pada dasarnya manusia –meminjam istilah Aristoteles- merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), karena memiliki naluri untuk hidup dengan lainnya. Naluri inilah yang disebut *gregariousness* sehingga manusia -sebagaimana diistilahkan oleh Adam Smith- juga disebut *homo homini socius*, yaitu manusia menjadi teman diantara manusia yang lain. Salah satu keunikan manusia adalah mempunyai dua kecenderungan utama sejak ia dilahirkan, yaitu keinginan bersosialisasi (baca: bermasyarakat), serta keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Jika kecenderungan pertama jamak melahirkan ilmu pengetahuan eksakta, maka pada pola kecenderungan kedua melahirkan tradisi atau kebudayaan. Interaksi dengan alam mampu melahirkan ilmu pengetahuan, sedangkan interaksi antar manusia, akan melahirkan sebuah masyarakat lengkap dengan instrumen kebudayaannya. Karena mustahil kebudayaan lahir tanpa masyarakat, pun juga tak ada masyarakat yang nihil akan kreatifitas kebudayaan.

Namun kebudayaan dewasa ini mengalami pergeseran yang luar biasa semenjak lahirnya budaya global. Budaya yang pada era konvensional diatribusikan ke dalam struktur masyarakat tertentu yang tak bisa dilepaskan dari teritori, maka saat ini –pasca pesatnya perkembangan teknologi-informasi-, seakan tak ada ambang batas kebudayaan antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Dari sinilah muncul kekhawatiran yang

⁸ Sindhunata, “Demitologisasi Persatuan Nasional” dalam *1000 Tahun Nusantara*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2000), 93.

salah satunya berpotensi menggerus identitas kebudayaan lokal, yang jamak melahirkan kebijaksanaan cum kearifan yang menjadi indikator keadaban umat manusia.

Habermas (1998) sebagaimana dikutip oleh Sugiono menyatakan bahwa saat ini manusia sedang memasuki era *postnationale konstellation*, yang ditandai dengan perubahan-perubahan dunia secara global.⁹ Proses perubahan ini, tak lagi bersifat statis dan memerlukan banyak waktu untuk mengubah wajah dunia, ia bahkan dalam waktu singkat mampu menggeser, mengubah bahkan menghilangkan tatanan-tatanan sosial yang telah ada.

Merasakan fenomena ini, banyak yang pesimis dengan masa depan negara, sehingga sempat ramai perdebatan tentang konsep "*the end of state*". Bahkan Fukuyama (1989) membuat sebuah asumsi akademik yang getir melalui karyanya yang bertitel *the End of History*. Terinspirasi dari pendapat Kojeve (1961), Fukuyama membenarkan bahwa arus sejarah -dalam konteks globalisasi- harus diarahkan menuju berdirinya negara "universal dan homogen" dengan unsur utamanya, yakni demokrasi liberal.¹⁰

Maka bisa dipahami bahwa globalisasi menjalar dengan begitu pesat, nyaris tanpa perlawanan karena berlangsung di berbagai lapisan masyarakat, bersifat *cross cutting* dan menyebar (*diffused*). Inilah yang menjadi ancaman serius bagi masa depan kebudayaan nasional, bahkan berpotensi menggerus kebudayaan-kebudayaan lokal yang menjadi *genius* masyarakat diberbagai negara, termasuk Indonesia. Hilangnya kebudayaan sama halnya dengan lenyapnya jati diri bangsa. Tak ada sesuatu yang dijadikan sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*).

Dewasa ini, dinamika sosial politik di Indonesia tengah merasakan bahwa pandangan hidup masyarakat nusantara, Pancasila, tengah mengalami tantangan yang serius. Dengan berbagai strategi dan propaganda, Pancasila yang memuat karakter kebangsaan dalam segmentasi sosial, politik, ekonomi dan ideologi digempur habis-habisan. Baik oleh kelompok masyarakat tertentu, atau kebijakan-kebijakan ekonomi-politik yang mendewakan liberalisasi, kapitalisme dan lain sebagainya, yang malah memperlebar keterjarakan antara ideologi kebangsaan dengan masyarakat Indonesia.

Pancasila, sebagai identitas nasional tengah menghadapi dua tantangan sekaligus. Yakni yang bersifat pemikiran dan perundang-undangan. Di satu sisi, dalam aspek pemikiran, Pancasila mengalami distorsi makna yang menjurus pada klaim politik dan pendistorsian "aqidah kebangsaan" yang melahirkan praktik monopoli kebenaran. Perundang-undangan yang masuk pada sisi lain tantangan Pancasila, bahkan turut menyumbang kemelut yang malah menjauhkan dari nilai-nilai dasar Pancasila, seperti keadilan, persamaan, permusyawaratan dan persatuan-kesatuan.

A. Menggagas Tiga Kompetensi Pendidikan Nasional di Era Millenial

Peran kompetensi di dunia pendidikan menempati posisi yang sangat krusial. Ia adalah parameter keberhasilan pelaksanaan implementasi pembelajaran. Tolak ukur

⁹ Muhadi Sugiyono, "Globalisasi, *Global Governence* dan Prospek *Governence* di Dunia Ketiga", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3. (2005), 250.

¹⁰ Alexandre Kojeve, *Introduction to the Reading of Hegel: Lecture on the Phenomenology of Spirit* (Basic Book, 1969), 159.

kesuksesan pendidikan, dapat dilihat dari sejauh mana kompetensi yang dicapai oleh peserta didik. Jika boleh diibaratkan dengan jual beli, kompetensi merupakan keuntungan (*profit*) yang bisa didapat siswa setelah melakukan proses “transaksi ilmu pengetahuan” dalam pembelajaran.

Kompetensi sendiri, merupakan entitas yang kombinatorik. Ia terlahir dari perpaduan yang harmonis antara pengetahuan, pemahaman, keterampilan, minat dan nilai.¹¹ Dari pemaknaan ini bisa dipahami, bahwa kompetensi tak hanya soal tingginya tingkat pengetahuan, namun sebuah kemampuan yang terlahir dari proses dialektis antara kapasitas intelektual, moral dan sosial. Untuk itulah, penting dipahami bahwa kompetensi merupakan sesuatu yang relasional.

Selanjutnya, kompetensi juga harus mampu menjadi pen jembatan untuk memberikan jalan keluar (*problem solving*) terhadap problematika yang berdenyut di tengah masyarakat. Pada posisi inilah, pendidikan dituntut untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Inovasi pendidikan pada konteks menjawab tantangan ini, dalam pandangan Nicols (1983) sebagaimana dikutip oleh Ode tak hanya dimaknai sebagai “asal berubah” saja. Namun harus mempunyai peningkatan pada sistem nilai, ide, keyakinan dan pengamalan-pengamalan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Pemaknaan lebih praktis dikemukakan oleh Spencer & Spencer (1993 : 9) yang berpandangan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu. *An underlying characteristic's of an individual which is causally related to criterion - referenced effective and or superior performance in a job or situation*. Istilah “*underlying characteristics*” mengandung makna kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan.

Sedangkan kompetensi adalah sebuah karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektifitas performa, karakteristik ini dapat dilihat seperti gaya bertindak, berperilaku, dan berpikir. Spencer and Spencer bahkan membuat karakteristik untuk mengidentifikasi kompetensi, yaitu:¹³

1. Motivasi (*Motives*)

Adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan. Spencer (1993) menambahkan bahwa motives adalah “drive, direct and select behavior toward certain actions or goals and away from others”.

2. Watak (*Traits*)

Adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan atau daya tahan.

3. Konsep Diri (*Self Concept*)

¹¹ Nur Hamin dkk, *Mencetak Guru Profesional* (Surabaya: Kopertais IV Press, 2008), 99.

¹² Sismono La Ode, dkk, *Di Belantara Pendidikan Bermoral*, 153.

¹³ L.M. Spencer & S. M. Spencer, *Competence at work: Models for superior performance* (New York: John Wiley & Sons, Inc, 1993), 10.

Adalah sikap dan nilai – nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.

4. Pengetahuan (*Knowledge*)

Adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar tetapi tidak bias melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

5. Kemampuan (*Skills*)

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Dengan mengetahui tingkat kompetensi maka perencanaan sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya.

Setelah dipaparkan sekilas tentang konsep kompetensi yang bersifat kombinitif-relasional, serta memiliki karakteristik sebagaimana dikemukakan di atas. Maka, untuk menjawab tantangan 72 tahun pendidikan nasional, penulis perlu menggagas tri-relasi kompetensi yang dibutuhkan Indonesia guna membentuk *brand image* pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan identitas nasional.

1. Kompetensi Kebudayaan; Upaya Mengokohkan Identitas

Berkaitan dengan kebudayaan, Tilaar dengan mengutip pendapat Charles Taylor pernah mengemukakan bahwa manusia yang berkembang tanpa identitas adalah manusia yang kehilangan pedoman.¹⁴ Akibatnya, ia hanyut dan terseret gelombang globalisasi yang menyeret manusia pada amnesia identitas nasional. Dampak lain yang ditimbulkan, aktivitas manusia yang tak berdasar nilai-nilai kebudayaan tak ubahnya seperti robot yang bekerja dengan rutinitasnya. Tak punya pedoman dan perasaan terhadap lingkungan sosial.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka menggagas kompetensi kebudayaan dalam pendidikan merupakan sebuah keniscayaan. Lalu apa relevansinya? Kebudayaan merupakan suatu cara hidup (*ways of life*), yang meliputi cara berpikir, cara berencana, cara bertindak, disamping segala karya nyata yang dianggap berguna, benar, dan dapat dipenuhi oleh anggota masyarakat dalam kesempatan bersama.

Dari pemaknaan diatas, dapat ditarik garis urgensinya bahwa produk pendidikan harus mampu mencetak generasi yang berkompeten untuk membentuk, merancang dan bertindak dengan cara hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu agar tidak terjungkal di dalam curamnya globalisasi. Jika tidak demikian, maka pendidikan hanya akan melahirkan manusia-manusia yang teralienasi dari ruang publik.

Jean Moule dalam bukunya *Cultural Competence : A Primer for Educators*, menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) *scope* dalam kompetensi budaya. Orientasi

¹⁴ HAR. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005), 205.

pendidikan, salah satunya harus diarahkan minimal dengan merujuk pada empat kategori *cultural competence* ini, antara lain: 1) menghargai keragaman (*valuing diversity*), 2) menjadikan dirinya sadar budaya (*being culturally self-aware*), 3) memahami dinamika-dinamika dalam interaksi budaya (*understanding the dynamics of cultural interaction*), 4) melembagakan pengetahuan tentang budaya dan melakukan penyesuaian terhadap keragaman budaya (*institutionalizing cultural knowledge and adapting to diversity*).¹⁵

2. Kompetensi Literasi Digital : Upaya Menyemai Keadaban Publik

Sebagai upaya untuk merespon gempuran globalisasi yang menyerang nyaris tanpa perlawanan, maka Indonesia harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup di abad ke-21 ini, melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, sampai masyarakat. World Economic Forum pada tahun 2015 lalu, menetapkan penguasaan enam literasi dasar yang sangat penting tidak hanya bagi peserta didik, bahkan masyarakat secara umum. Enam literasi dasar tersebut mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan (Kemendikbud, 2017: vi).

Gilster dalam bukunya yang berjudul *Digital Literacy* (1997) sebagaimana dikutip oleh Kemendikbud menerangkan bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami sekaligus mampu menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer.¹⁶

Untuk itu, setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Literasi digital dalam konteks saat ini, sama pentingnya dengan kemampuan membaca, menulis, berhitung sebagai keterampilan dasar yang harus dimiliki. Karena, generasi yang tumbuh dengan akses informasi tanpa batas, cenderung mempunyai pola berpikir yang berbeda dan relatif memiliki proses pola berpikir instan dibanding generasi sebelumnya. Pada gilirannya, setiap orang tentu harus paham bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Teknologi digital memungkinkan orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dunia maya saat ini semakin disesaki konten yang berita bohong (*fake news*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan radikalisme, bahkan praktik-praktik penipuan. Keberadaan konten negatif yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa ditangkal dengan membangun kesadaran serta menanamkan pemahaman tentang bagaimana mengoperasikan piranti teknologi berbasis internet dengan ramah dan edukatif.

Menjadi literat digital berarti berkompeten untuk tak hanya sekedar memproses berbagai informasi, namun juga memahami pesan di dalamnya sekaligus dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini,

¹⁵ Jean Moule, *Cultural Competence : A Primer for Educators, 2 Edition* (Thomson/Wadsworth, 2012), 124.

¹⁶ Tim GLN Kemendikbud, *Gerakan Literasi Nasional* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 8.

bentuk yang dimaksud termasuk menciptakan, mengkolaborasi, mengomunikasikan, menghargai, berkolaborasi, menghormati yang dilandasi dengan keadaban publik. Ke depan, peserta didik harus mampu memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Mendorong peserta didik, untuk beralih dari konsumen informasi yang pasif menjadi produsen aktif, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Jika generasi muda kurang menguasai kompetensi digital, hal ini sangat berisiko bagi mereka untuk tersisih dalam persaingan memperoleh pekerjaan, partisipasi demokrasi, dan interaksi sosial.

Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis-kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif, menjadi korban informasi hoaks, atau korban penipuan yang berbasis digital. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif. Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Karya Douglas A.J. Belshaw yang berjudul *What is 'Digital Literacy'?* (2011) yang dikutip oleh Kemendikbud bahkan telah mengkategorikan delapan elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yaitu sebagai berikut: 1) Kultural, 2) Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten; 3) Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual; 4) Komunikatif, yaitu memahami teknik komunikasi di dunia digital; 5) Kepercayaan diri; 6) Kreatif, mencipta hal baru yang positif; 7) Kritis dalam menyikapi konten; dan 8) Bertanggung jawab secara sosial.¹⁷

Dari beberapa aspek di atas, Belshaw menekankan aspek kultural yang eksistensinya sangat krusial. Hal ini mengingat karena memahami konteks pengguna (baca: kultural) akan membantu kinerja kognitif dalam menilai dan mengkritisi konten.

Sehingga, dalam menghadapi era millennial ini, pendidikan harus memenuhi "ruang kosong" yang sampai hari ini masih sangat minim perhatian. Yakni kecakapan literasi digital. Kompetensi ini, diharapkan mampu mendongkrak pengetahuan dan kecakapan peserta didik untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, serta patuh pada hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.

3. Kompetensi Kebangsaan : Upaya Mengokohkan Spirit Ke-Indonesia-an

Kompetensi kebangsaan dalam paper ini merupakan upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) spirit nasionalisme di lembaga pendidikan, yang implementasinya

¹⁷ Ibid., 7.

tidak hanya sebatas materi pelajaran dan acara seremonial semisal upacara saja. Namun lebih dari itu, paham sekaligus sikap kebangsaan harus dikembangkan melalui tujuan yang jelas dan *measurable*.

Dalam konteks kompetensi kebangsaan ini, maka peserta didik diarahkan menjadi *good and responsible citizen* yang memiliki komponen, antara lain:

- a. Pengembangan nilai-nilai demokratis; meliputi keadilan, ketaatan pada hukum (*rule of law*), kebebasan beraspirasi dan berasosiasi.
- b. Pengembangan kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas (*civic and community values*) yang terangkum dalam sikap saling menghargai perbedaan serta pengakuan terhadap hak-hak individu, *local needs* dan menjunjung tinggi keadaban publik (*common good*).
- c. Pengembangan ikatan sosial dan kebhenekaan yang termanifestasikan melalui sikap toleransi, keadilan sosial dan *acceptance*.
- d. Pengembangan kehidupan pribadi yang bisa diimplementasikan melalui keberpihakan pada kebenaran (dari manapun datangnya, tidak memandang ras, suku, agama dan adat), tunduk pada aturan hokum, jujur, sopan dan punya gairah untuk saling tolong menolong merawat persatuan-kesatuan.

Dalam diskursus keilmuan islam, kompetensi kebangsaan bertumpu pada titik poin persaudaraan (*al-akhuwah*). Karena, berangkat dari simpul persaudaraan inilah berpotensi melahirkan integritas sosial bahkan integritas nasional. Jika ditelisik dalam doktrin ajarannya, islam mempunyai konsep persaudaraan yang pernah diintrodusir oleh seorang ulama *par-exellent*, Kiai Ahmad Siddiq melalui konsep trilogi *ukhuwah*-nya, yaitu yang dikenal dengan prinsip *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama umat islam), *ukhuwah imaniyah* (persaudaraan lintas iman), dan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan kemanusiaan) dalam upaya memperkuat bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus ikut serta membangun tata kehidupan global yang damai. Dari ketiga tipe *ukhuwah* inilah, akan lahir persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*).

Tabel 1
Desain Tri Relasi Kompetensi Pendidikan Nasional

Karakter Kompetensi	KOMPETENSI		
	Kebangsaan	Kebudayaan	Digital Literasi
Motivasi	<i>Ukhuwah islamiyah</i> (persaudaraan sesama islam), <i>ukhuwah imaniyah</i> (persaudaraan lintas iman), <i>ukhuwah basyariyah</i>	Kesadaran budaya (<i>being culturally self-aware</i>)	Kolaborasi, interaksi

	(persaudaraan atas dasar kemanusiaan), <i>ukhuwah wathaniyah</i> (persaudaraan kebangsaan)		
Watak	Penghargaan dan penghormatan	Keharmonisan, keselarasan	Komunikatif, percaya diri. Kreatif
Konsep Diri	Persatuan dan kesatuan	Melestarikan tradisi	Validasi
Pengetahuan	Sejarah kebangsaan dan keindonesiaan	memahami dinamika-dinamika dalam interaksi budaya <i>(understanding the dynamics of cultural interaction)</i>	Konfirmatif, evaluatif, kritis
Keterampilan/ perilaku	Pembelaan dan menjunjung tinggi lambang negara, pengorbanan, pengabdian serta perjuangan untuk tanah air	1) menghargai keragaman (<i>valuing diversity</i>), melembagakan pengetahuan tentang budaya dan menyesuaikan keragaman budaya <i>(institutionalizing cultural knowledge and adapting to diversity)</i> .	Operasional IT, produksi, posting, broadcasting narasi positif

Kesimpulan

Pendidikan berjalan harus menyesuaikan dengan denyut perubahan zaman yang begitu pesat. Setidaknya, terdapat tiga tantangan mendesak yang harus dijawab oleh pendidikan nasional. Problem kemajuan teknologi informasi, spirit kebangsaan dan sosial-kebudayaan menjadi isu seksi yang tak boleh hanya dibahas, tapi juga harus dijawab dengan tuntas. Pada aspek tertentu, jika pendidikan hanya merespon kemajuan ilmu pengetahuan *an sich*, akan melahirkan manusia mekanis yang jauh dari nilai-nilai spiritual dan kebudayaan. Untuk itu di era millennial ini, perlu membentuk "*brand image*" pendidikan nasional dengan menginisiasi tiga kompetensi yang harus dijalankan dengan saling terintegrasi satu dengan yang lain. Yakni kompetensi digital, kompetensi kebangsaan dan kompetensi kebudayaan. Pengarusutamaan tiga komponen di era milleneial ini menjadi sangat krusial, karena tantangan ke depan, jamak bermuara melalui

ketiga segmentasi tersebut. Sehingga, memberikan pemahaman dan kompetensi generasi bangsa melalui tiga hal ini, selain sebagai modal menghadapi derasnya gelombang perubahan zaman, juga dalam rangka membangun citra diri pendidikan nasional yang *genuine* di tengah kontestasi pendidikan dunia.

Daftar Pustaka

- Dewantara, Ki Hajar. *Bagian Kedua Kebudayaan*. Cet III. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa. 2011.
- Fukuyama, Francis. *The End of History?* Summer. 1989.
- Hamim, Nur. dkk. *Mencetak Guru Profesional*. Surabaya: Kopertais IV Press. 2008.
- Kojeve, Alexandre. *Introduction to the Reading of Hegel: Lecture on the Phenomenology of Spirit*. Basic Book. 1969.
- Moule, Jean. *Cultural Competence : A Primer for Educators. Second Edition*. Wadsworth. Cengage Learning. 2012.
- Ode, Sismono La, dkk. *Di Belantara Pendidikan Bermoral*. Yogyakarta: UNY Press. 2006.
- Sindhunata. "Demitologisasi Persatuan Nasional" dalam *1000 Tahun Nusantara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2000.
- Spencer, L.M., & Spencer, S.M. *Competence at work: Models for superior performance*. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1993.
- Sugiono, Muhadi. "Globalisasi, *Global Governence* dan Prospek *Governence* di Dunia Ketiga". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 8, No. 3. 2005.
- Tilaar, HAR. 2012. *Kalaidoskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
-, *Manifesto Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005.
- Tim GLN Kemendikbud, *Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.